Pontianak Post
Jumat 1 Juli 2011

Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Mulai Membaik

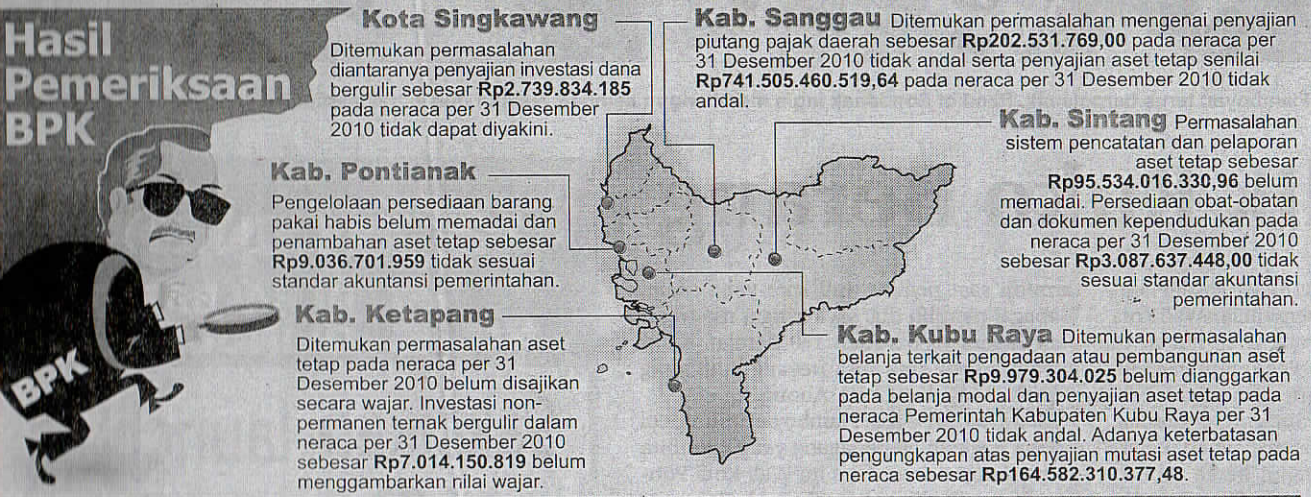

mber: BPK Perwakilan Kalbar

GRAFIS : SIGIT/PONTIANAKPOST

PONTIANAK - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat menyerahkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2010 kepada enam entitas, yakni Kabupaten Pontianak, Sintang, Singkawang, Kubu Raya, Sanggau dan Ketapang, Kamis (30/7) di gedung BPK Perwakilan Kalbar.

LHP diserahkan Kepala Perwakilan BPK-RI Kalbar Adi Sudibyo kepada Ketua DPRD tiap entitas. Turut hadir bupati/wali kota, inspektorat dan beberapa pejabat dari pemerintah daerah yang bersangkutan serta pejabat struktural di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalbar.

"Berdasar hasil pemeriksaan terhadap enam entitas tersebut, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian untuk Kabupaten Pontianak, Sintang, Sanggau, dan Ketapang, dan Singkawang serta opini tidak wajar untuk Kubu Raya," kata Humas BPK Perwakilan Kalbar Sigit Yudha Pratama.

Dia merinci beberapa item yang ditemukan BPK dalam pemeriksaannya dan memengaruhi opini tiap entitas. Meliputi; pada Kabupaten Pontianak terdapat permasalahan mengenai pengelolaan persediaan barang pakai habis belum memadai dan penambahan aset tetap sebesar Rp9.036.701.959 tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Di Sintang ditemukan adanya permasalahan sistem pencatatan dan pelaporan aset tetap sebesar Rp95.534.016.330,96

• ke halaman 15 kolom 3

Tata Kelola Keuangan...

Sambungan dari halaman 9

belum memadai. Temuan mengenai persediaan obat-obatan dan dokumen kependudukan pada neraca per 31 Desember 2010 sebesar Rp3.087.637.448,00 tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Sigit menambahkan, Sanggau masih ditemukan permasalahan mengenai penyajian piutang pajak daerah sebesar Rp202.531.769,00 pada neraca per 31 Desember 2010 tidak andal serta penyajian aset tetap senilai Rp741.505.460.519,64 pada neraca per 31 Desember 2010 tidak andal.

Sementara Ketapang masih ditemukan permasalahan aset tetap pada neraca per 31 Desember 2010 belum disajikan secara wajar. Investasi non-permanen ternak bergulir dalam neraca per 31 Desember 2010 sebesar Rp7.014.150.819 belum menggambarkan nilai wajar.

Kemudian pada Pemkot Singkawang masih ditemukan permasalahan diantaranya penyajian investasi dana bergulir sebesar Rp2.739.834.185 pada neraca per 31 Desember 2010 tidak dapat diyakini.

Sedang untuk Kabupaten Kubu Raya memperoleh opini TW karena masih ditemukan beberapa permasalahan. Diantaranya belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset tetap sebesar Rp9.979.304.025 belum dianggarkan pada belanja modal dan penyajian aset tetap pada neraca Pemerintah Kabupaten Kubu Raya per 31 Desember 2010 tidak andal. Adanya keterbatasan pengungkapan atas penyajian mutasi aset tetap pada neraca sebesar Rp164.582.310.377,48.

Kepala Perwakilan BPK, menyampaikan dorongannya kepada pemerintah daerah untuk semakin memperbaiki tata kelola keuangan pemerintah daerah menuju hal yang lebih baik lagi. "Terkait penyerahan HP hari ini, pejabat pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam HP dalam jangka waktu 60 hari," kata Adi melalui Humas BPK. ***(stm)***